eBulletin IDEOLOGI

EDISI 17
MARET
2026

TIM KONTEN MPP PKS

Salam Redaksi

Ada satu pelajaran sunyi dari sejarah yang sering luput kita dengar: banyak perjuangan besar tidak gugur karena kekurangan orang baik, tetapi karena kehilangan bentuk—kehilangan struktur yang menjaga arah. Dalam Edisi-17 ini, Syamsu Hilal mengajak kita menatap ulang makna kelembagaan, bukan sebagai bagan dingin yang kaku, melainkan sebagai arsitektur nilai yang hidup. Ia seperti rangka tubuh bagi ruh perjuangan—tak terlihat mencolok, tetapi menentukan tegak atau runtuhnya sebuah gerakan.

Melalui uraian yang tenang namun tajam, ia menyingkap bagaimana PKS merajut struktur bukan sekadar untuk mengatur, tetapi untuk menjaga amanah. Dari puncak Majelis Syura hingga denyut kerja di akar rumput, semuanya disusun dalam harmoni antara kepemimpinan kolektif dan disiplin nilai. Di sana, kekuasaan tidak dibiarkan liar, tetapi ditundukkan oleh musyawarah, etika, dan kesadaran bahwa perjuangan ini lebih panjang dari usia jabatan. Struktur, pada akhirnya, bukan sekadar alat—ia adalah penjaga makna, agar keadilan tetap punya rumah, dan cita-cita tidak kehilangan arah

Selamat Membaca...

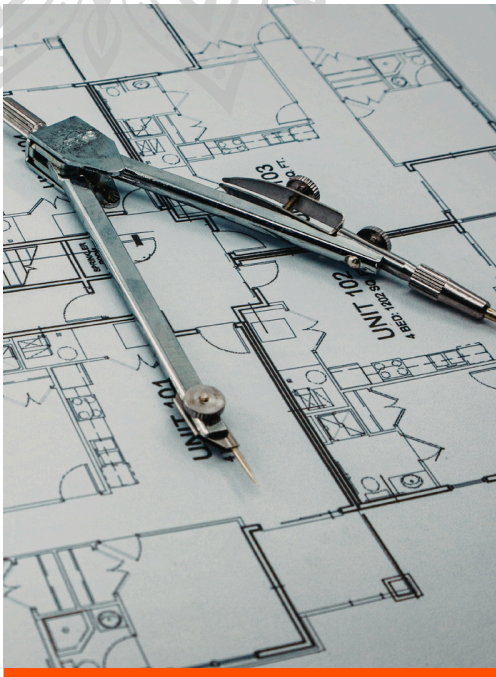

MPP PKS

eBuletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat (MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (KDP) baik AD/ART, Falsafah, Platform, GBKP, Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara jelas dan padat KDP untuk pengokohan IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting dibaca dan dihayati bagi pimpinan dan kader PKS. Juga untuk edukasi masyarakat luas agar lebih mengenal perjuangan PKS.

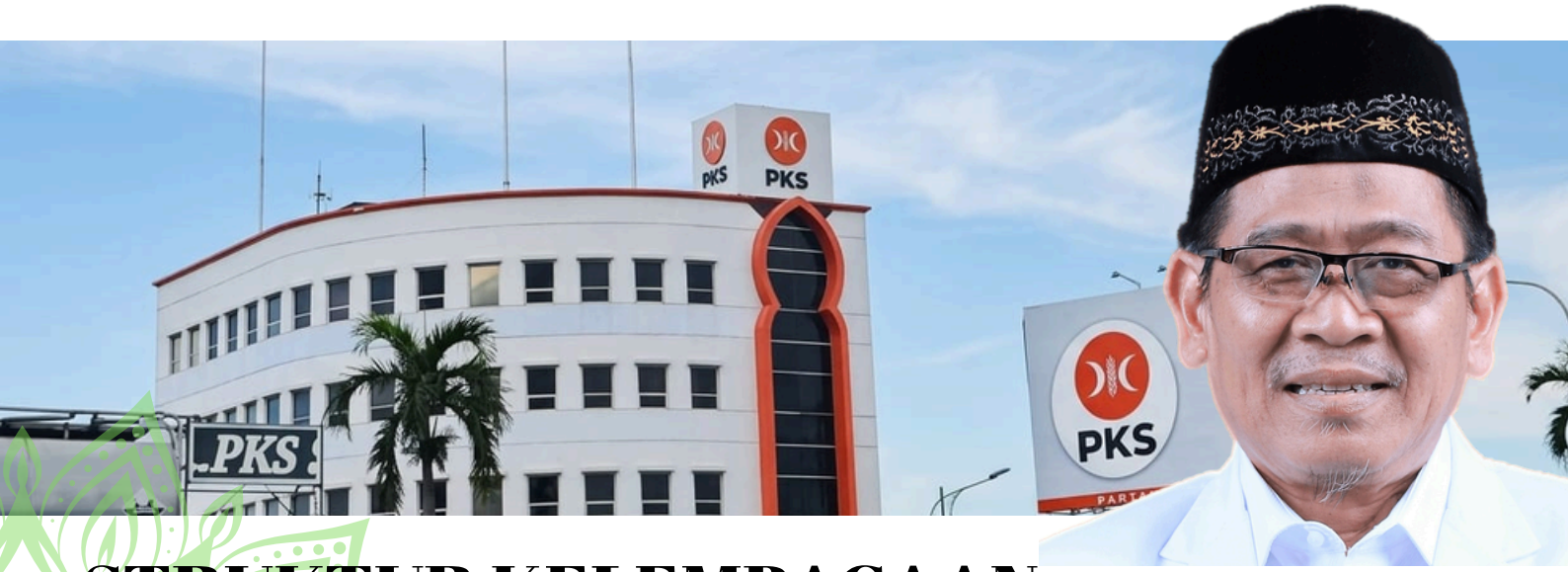

STRUKTUR KELEMBAGAAN: Arsitektur Nilai, Kepemimpinan Kolektif, dan Amanah Perjuangan

Syamsu Hilal
Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi, MPP PKS

Pendahuluan: Struktur sebagai Penjaga Arah

Sebuah perjuangan besar tidak cukup hanya dengan semangat. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan struktur yang kokoh agar cita-cita tidak tercerai oleh dinamika zaman. Dalam perjalanan sejarah organisasi, banyak gerakan tumbang bukan karena kekurangan kader, tetapi karena rapuhnya arsitektur kelembagaan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami hal ini secara mendalam. Karena itu, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) PKS Tahun 2025, struktur dan kelembagaan Partai dirancang secara sistemik, berjenjang, dan berlandaskan nilai.

Organisasi Partai terdiri atas Lembaga Partai dan Struktur Partai. Dua unsur ini membentuk keseimbangan antara kepemimpinan strategis dan pelaksanaan operasional.

Struktur dalam PKS bukan sekadar bagan organisasi. Ia adalah mekanisme penjaga amanah dan kesinambungan perjuangan.

I. Majelis Syura: Pusat Arah dan Legitimasi.

Di puncak arsitektur organisasi PKS berdiri Majelis Syura, yang ditegaskan sebagai Lembaga Tertinggi Partai.

Dalam tradisi keilmuan Islam, fungsi ini disebut sebagai ahlul halli wal ‘aqdi, yaitu majelis permusyawaratan tertinggi Partai yang memikul tanggung jawab menjaga arah perjuangan.

Majelis Syura memiliki kewenangan strategis, di antaranya:

- memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Majelis Syura;
- atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan: Wakil Ketua Majelis Syura, Sekretaris Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Presiden Partai, dan Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP);
- menetapkan Anggota Majelis Syura; dan
- mengubah dan menetapkan AD dan ART Partai.

Selain itu, dalam forum Musyawarah Nasional (Munas), Majelis Syura bertugas menetapkan:

- Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan Partai;
- Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
- Garis Besar Kebijakan Partai; dan
- Rencana Strategis Partai.

Struktur ini menunjukkan bahwa PKS dibangun di atas kepemimpinan kolektif, bukan personalistik.

Keputusan besar tidak lahir dari satu tangan, tetapi dari musyawarah para pemimpin yang teruji komitmen dan integritasnya.

Dalam perspektif ruhiyah, Majelis Syura adalah simbol amanah kolektif. Ia menjaga agar arah perjuangan tetap berada dalam koridor nilai, konstitusi, dan cita-cita kebangsaan.

II. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat: Penghubung Strategi dan Implementasi.

Jika Majelis Syura adalah pusat arah, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) adalah badan pekerja yang memastikan arah itu terimplementasi.

Dalam AD dan ART PKS, DPTP berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura dan memberikan rekomendasi strategis terkait pencalonan presiden, kepala daerah, serta jabatan politik lainnya.

Rekomendasi DPTP bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai dari Tingkat Pusat hingga tingkat desa/kelurahan.

Sebuah perjuangan besar tidak cukup hanya dengan semangat. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan struktur yang kokoh agar cita-cita tidak tercerai oleh dinamika zaman. Dalam perjalanan sejarah organisasi, banyak gerakan tumbang bukan karena kekurangan kader, tetapi karena rapuhnya arsitektur kelembagaan.

Di sini terlihat mekanisme check and balance internal. Tidak ada ruang bagi keputusan serampangan.

Setiap kebijakan melewati proses musyawarah dan rekomendasi yang terstruktur.

Struktur ini mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak prerogatif personal.

III. Mahkamah Partai dan Dewan Syariah: Penjaga Integritas.
Soliditas organisasi bukan hanya ditentukan oleh struktur kepemimpinan, tetapi juga oleh sistem penegakan etik dan disiplin.

PKS memiliki Mahkamah Partai, lembaga kemahkamahan tertinggi Partai yang memutus perselisihan di internal Partai pada tingkat akhir.

Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. Ini adalah simbol supremasi aturan dalam tubuh organisasi.

Selain itu, terdapat Dewan Syariah Pusat yang bertugas menetapkan landasan syariah dan Kode Etik Partai, serta menetapkan putusan terhadap Pelanggaran Syariah, Disiplin Organisasi, dan Kode Etik Partai.

Dewan Syariah bukan sekadar lembaga formal. Ia adalah penjaga ruh perjuangan.
Ia memastikan bahwa politik tidak tercerabut dari moralitas. Bahwa strategi tidak melampaui etika.

Dengan dua pilar ini, PKS membangun sistem yang bukan hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga kokoh secara moral.

Tim Konten MPP PKS

IV. Struktur Berjenjang: Dari Pusat hingga Akar Rumput

Struktur PKS tersusun secara hierarkis dan berjenjang:

- Tingkat Pusat;
- tingkat provinsi;
- tingkat kabupaten/kota;
- tingkat kecamatan; dan
- tingkat desa/kelurahan

Struktur ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya kuat di pusat, tetapi hadir hingga akar rumput. Dari ibu kota negara hingga desa, terdapat sistem kepengurusan yang jelas, masa bakti yang teratur, serta pertanggungjawaban yang berjenjang.

Soliditas ini bukan lahir dari sentralisasi mutlak, tetapi dari koordinasi, konsultasi, dan musyawarah di setiap tingkat.

V. Prinsip Musyawarah dan Anti-Rangkap Jabatan.

Struktur yang solid juga ditopang oleh prinsip tata kelola yang sehat. PKS menegaskan bahwa musyawarah adalah mekanisme utama pengambilan keputusan. Keputusan diupayakan melalui mufakat, berlandaskan nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan.

Selain itu, terdapat larangan rangkap jabatan dalam kepengurusan organisasi.

Prinsip ini menjaga profesionalitas dan mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu.

Dalam perspektif ideologis, ini adalah bentuk komitmen terhadap keadilan struktural dan tata kelola yang bersih.

VI. Lembaga Pendukung: Kearifan dan Kepakaran.

Struktur PKS juga dilengkapi dengan:

- Dewan Kehormatan
- Dewan Penasihat
- Dewan Pakar
- Organisasi Sayap Partai

Ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga

Struktur kelembagaan yang solid bukan tujuan akhir. Ia adalah sarana untuk menjaga arah perjuangan. Dalam PKS, struktur dibangun untuk memastikan bahwa cita-cita nasional—sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945—diperjuangkan secara terarah dan berkelanjutan.

Tim Konten MPP PKS

membuka ruang bagi ketokohan, kepakaran, dan pengembangan potensi kader.

Soliditas bukan berarti kaku. Ia adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap kontribusi keilmuan dan pengalaman.

Penutup: Struktur sebagai Amanah dan Jalan Keberlanjutan

Struktur kelembagaan yang solid bukan tujuan akhir. Ia adalah sarana untuk menjaga arah perjuangan. Dalam PKS, struktur dibangun untuk memastikan bahwa cita-cita nasional—sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945—diperjuangkan secara terarah dan berkelanjutan.

- Majelis Syura menetapkan arah.
- DPTP menjaga arah implementasi.
- Majelis Pertimbangan memberikan landasan konsepsional.
- Dewan Pengurus mengelola operasional.
- Mahkamah Partai dan Dewan Syariah menjaga integritas.
- Struktur berjenjang menguatkan akar perjuangan.

Soliditas ini lahir dari kesadaran bahwa perjuangan adalah amanah panjang, bukan agenda lima tahunan semata.

Di sinilah struktur kelembagaan PKS menemukan makna terdalamnya: sebagai arsitektur nilai, penjaga amanah, dan fondasi kepeloporan menuju Indonesia Madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.#

Tim Konten MPP PKS